

Abstract

by:

Laurensia Andrini,¹ M.Hawin²

Regulation on CSR under laws and regulations of Company Act have not given clarity and legal certainty as it does not stipulate sanction and control mechanism. In the practical level, the implementation of CSR is often mistargeted because the company does not have a clear guidance to fulfill people's demand. It is the purpose of this research to understand the obligatory CSR towards companies who perform business in the field of and or related to natural resources as well as to understand how far company's CSR contributes to people's welfare.

This thesis is a normative-empirical research, utilizing library research and field research to answer the legal problems. In the library research, the author uses literature review in collecting legal source. In the field research, the author interviewed several limited liability companies which perform CSR. This research is using qualitative data analysis, resulting in a descriptive and analytical information to obtain the objective of the research.

The result of this research points out the reason behind mandatory CSR in Indonesia and relate it with the national philosophy, particularly the social justice. Since government, company, and people are seen as a unity in the system theory, it has become company's responsibility to conduct CSR in order to create balance in the society. From the research conducted, the author found that company's contribution is sometimes less-significant to the people's interests as it does not meet the parameter of social welfare.

Keyword: CSR, Limited Liability Company, Welfare, Mandatory CSR.

¹ Master of Legal Science Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer of Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

Intisari

oleh:

Laurensia Andrini,¹ M. Hawin²

Pengaturan tentang TJSL di bawah peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas belum menunjukkan adanya kejelasan dan kepastian hukum. Peraturan perundangan tersebut tidak memberikan sanksi yang jelas serta mekanisme untuk mengawasi implementasi TJSL. Di tingkat praktis, pelaksanaan TJSL sering tidak tepat sasaran karena perusahaan tidak mendapatkan pengarahan yang tepat untuk memenuhi permintaan masyarakat. Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kewajiban TJSL serta untuk melihat kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan umum.

Penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan studi pustaka dan studi lapangan untuk mengumpulkan data. Pada studi pustaka, penulis menggunakan sumber-sumber hukum untuk mendukung analisa. Penelitian ini didasarkan terutama pada Undang-undang no. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Pada studi lapangan, penulis mewawancarai beberapa perusahaan yang telah melaksanakan TJSL. Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa data kualitatif, dengan hasil yang disusun secara deskriptif-analisis untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini mencari dasar pengaturan TJSL yang menjadi kewajiban dengan landasan filosofi bangsa, terutama keadilan sosial. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dianggap sebagai satu kesatuan dalam teori sistem. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan TJSL supaya menjaga keseimbangan dalam sistem. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa kontribusi perusahaan seringkali kurang signifikan terhadap kebutuhan masyarakat karena belum memenuhi parameter kesejahteraan nasional.

Kata kunci: TJSL, Perseroan Terbatas, Kesejahteraan.

¹ Master of Legal Science Program, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.